

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM NUSANTARA: ISLAM TANPA KEMISKINAN

Oleh Muslimin¹

Islam Nusantara menjadi isu perdebatan yang cukup hangat (dan bahkan cenderung keras) baik di media massa cetak maupun online. Pada media sosial, isu Islam Nusantara sebagai platform berislam Nahdlatul Ulama, menjadi perdebatan yang cenderung sarkastik, dengan menempatkan Islam Nusantara sebagai Islam yang anti-Arab. Kondisi tersebut pada akhirnya menjadi perdebatan yang tidak produktif, dan bahkan melemahkan ukhuwah islamiyah antarsesama umat Islam di Indonesia.

Islam Nusantara, sebagai materi utama dalam Madrasah Kader Nahdlatul Ulama, pada prinsipnya mendasarkan pada tiga hal, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr.K.H. Said Aqil Siroj MA pada pengantar Buku Islam Nusantara karangan Muhammad Sulton Fatoni, yaitu; (i) Aspek Fiqh mengikuti salah satu empat Mazhab dimana di nusantara adalah madzhab Imam Syafii, (ii) AspekTauhid mengikuti konsep Imam Abulhasan Al-Asya'ari, dan (iii) Aspek tasawuf mengikuti Mazhab Imam Ghazali dan Abul Hasan As-Syadzili. Pada pengantar yang sama, Ketua PBNU juga menegaskan pentingnya untuk terus dilakukan penggalan-penggalan dalam upaya merawat dan mengembangkan tradisi-tradisi yang ada pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebagai bagian penguatan khidmat NU dengan pola khas Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyyah, merawat tradisi dan mengupayakan inovasi.

Jika mengacu pada ketiga aspek Islam Nusantara yang menjadi orientasi berislam NU sebagai mainstream umat Islam di Indonesia, tidak selayaknya Islam Nusantara dituduh sebagai Islam yang anti-antian. Pendapat bahwa Islam Nusantara adalah antiArab adalah pemahaman yang tidak benar. Islam Nusantara, pada prinsipnya, meletakkan Islam sebagai agama universal yang dapat bersanding harmonis dengan budaya apapun. Mendefinsikan bahwa Islam bersifat rahmat yang tidak dapat direpresntasikan oleh suku bangsa manapun, termasuk Arab, selain oleh nilai-nilai Islam yang ada pada ajaran Islam itu sendiri. Dalam konteks Islam Nusantara, memposisikan Islam sebagai sumber inspirasi budaya dan peradaban umat Islam Indonesia melalui dakwah yang dilakukan oleh wali songo.

Jika menilik lebih dalam, dengan mereferensi dialog interaktif KH Agus Sunyoto (<https://www.youtube.com/watch?v=bhMOIk9oGGc>), dimensi Islam Nusantara sangatlah luas. Islam Nusantara ala NU tidak hanya ditujukan untuk menekankan posisi Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Bangsa dan Negara Indonesia, namun juga aspek-aspek yang lebih luas mengikuti pola dakwah wali songo, yang sudah dilakukan berabad-abad di Indonesia, salah satunya adalah dimensi ekonomi.

Dimensi ekonomi implementasi Islam Nusantara adalah salah satu dimensi yang sangat berat. Hal ini mengingat orientasi nusantara masa lampau sebagai idealita ekonomi. Jika menelusuri pernyataan KH Agus Sunyoto, suku-suku bangsa yang hidup di nusantara ini tidak mengenal kosa kata miskin. Kata miskin atau fakir merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

dipergunakan hingga saat ini. Atas dasar idealitas tersebut, Islam Nusantara secara tidak langsung sebenarnya telah menantang NU dan Jam'iyahnya untuk menjadi pionir atau aktor yang berperan dalam pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karenanya, dimensi ekonomi Islam Nusantara harus didorong menjadi diskursus publik, sehingga perdebatan-perdebatan yang muncul menjadi lebih produktif, selain sebagai media mempertajam aspek-aspek operasional bagaimana pengimplimentasian Islam Nusantara mewujudkan masyarakat tanpa kemiskinan.

Sebagai sebuah tantangan internal, NU pada prinsipnya memiliki modal dasar untuk mewujudkan platform masyarakat nusantara yang tanpa kemiskinan. Modal dasar tersebut diantaranya adalah; (i) basis jam'iyah yang menyebar dan berada pada sumber bahan baku produksi, (ii) adanya pesantren sebagai insitusi yang menciptakan SDM, (iii) soliditas dan solidaritas jam'iyah melalui tradisi-tradisi keagamaan. Ketiga modal dasar ini, jika disinergikan, setidaknya, akan melahirkan basis ekonomi rakyat yang mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Basis jam'iyah NU yang besar dan berada pada sumber bahan baku produksi, umumnya hanya dipergunakan sebagai kantong-kantong politik oleh para politisi sebagai basis elektoral. Politik adalah pertarungan kalah menang, yang dalam jangka panjang, akan kurang menguntungkan bagi penciptaan sinergi ekonomi NU. Adagium yang cukup akrab terdengar, NU hanya dipergunakan untuk mendorong mobil mogok, dimana setelah jalan, jam'iyah ditinggal lari kencang oleh mobil mogok yang dibantu sebelumnya. Relasi politik semacam itu memang tidak mungkin dihilangkan karena NU tidak hidup di ruang hampa, namun setidaknya orientasi-orientasi tersebut dapat diperkecil. Salah satu yang dapat dilakukan adalah penguatan platform pengembangan basis ekonomi berdasarkan potensi wilayah dimana basis jam'iyah tersebut berada. Dengan basis pengembangan produksi, jam'iyah akan tetap mendapatkan manfaat dengan berkembangnya aktivitas produksi di basis jam'iyah, tidak peduli diajak atau ditinggal mobil yang mogok sebelumnya itu.

Modal dasar kedua, yaitu pesantren, merupakan modal insitusional dimana NU dapat menghasilkan SDM-nya sendiri. NU harus mendorong reposisioning pesantren kembali kepada pesantren pada jaman wali songo sebelumnya. Mengacu kepada apa yang telah disampaikan oleh KH Agus Sunyoto, pesantren pada waktu walisongo merupakan instiusi yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, namun juga mengajarkan ilmu metalurgi atau pengolahan logam. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa kemudian Portugis tidak dapat mendarat di pulau Jawa, mengingat kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu memiliki meriam yang dipasok oleh pesantren. Hal ini menyiyaratkan bahwa posisi pesantren pada masa walisongo mengajarkan ilmu pengetahuan umum yang menjawab kebutuhan masyarakat pada masanya, selain juga mengajarkan ilmu-ilmu agama.

Pola inilah yang kemudian diadopsi oleh sekolah-sekolah Islam, yang mengambil metode dan kurikulum pesantren untuk diterapkan sebagai standar pendidikan sekolah Islam terpadu. Pesantren sebagai ahli waris metode wali songo, saat ini hanya bisa melihat warisannya dikembangkan melalui kapitalisasi pendidikan, sedangkan nafas dakwah dipikul sendiri oleh pesantren. Kondisi ini harus diakhiri melalui revitalisasi pesantren secara jam'iyah,

menyatukan kembali wadag dan nafas pesantren yang selama ini terpisah, sebagai akibat mungkin kurang dirawat. Pola pesantren sebagai pencipta SDM telah menjadi kebutuhan masyarakat, hal ini karena masyarakat SDM dengan kapasitas yang baik tidaklah cukup tanpa adanya akhlak yang baik. Dan manusia yang berakhlak adalah 100% manusia yang beretika, manusia-manusia yang dibutuhkan oleh masyarakat luas saat ini. Dan pesantren, adalah ahli waris yang seharusnya menjadi pionir dalam penciptaan SDM yang dibutuhkan itu.

Modal dasar ketiga adalah tradisi keagamaan yang mampu menciptakan soliditas dan solidaritas ke-NU-an. Tidak sebagaimana organisasi tanpa tradisi yang akan kerepotan untuk melakukan konsolidasi, NU dapat mengoptimalkan aktivitas-aktivitas tradisi keagamaan sebagai momentum monitoring dan evaluasi agenda-agenda ekonomi Islam Nusantara. Hal tersebut dapat diperkaya melalui agenda-agenda peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang menggerakkan Islam Nusantara secara ekonomi. Melalui aktivitas tradisi-tradisi keagamaan tersebut, aktivitas tradisi diperkuat dengan penciptaan soliditas dan solidaritas kader penggerak Islam Nusantara secara ekonomi.

Melalui penguatan modal dasar yang dimiliki diatas, instrumen-instrumen NU akan menjadi satu rangkaian *religious supply chain*, menjadi rangkaian rantai penawaran yang memiliki nafas keagamaan sebagai perwujudan Islam Nusantara secara ekonomi, menuju idealita masyarakat tanpa kemiskinan sebagaimana nusantara masa lampau. Semoga.